

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, 1997, Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman, *Thesis*, Yogyakarta.
- Boyne, George A., Party Competition and Local Spending Decision
- Cambell, Colton C. and Davidson, Roger H., US Congressional Committees: Changing Legislative Workshops
- Chandrarin, Grahita, 1996, Hubungan Antara Partisipasi Dengan Kepuasan Pemakai dalam Pengembangan Sistem Berbasis Komputer: Suatu Tinjauan Dua Faktor Kontinjensi, *Thesis*, UGM, Yogyakarta.
- Dharma, Surya, 2002, Efek Moderasi variabel-Variabel Organisasional dalam Hubungannya antara Karakteristik Penilaian Kinerja Karyawan Pendekatan Kontinjensi, Tesis, UGM, Yogyakarta.
- Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah Dirjen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, 1981, Manual Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta.
- Farrell, David M. & McAllister, Ian, Legislative Recruitment to Upper Houses: The Australian Senate and House of Representatives Compared.
- German Technical Cooperation & Clean Urban Project, Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Bagi Pemerintah Daerah
- Gilligan, Thomas W. & Matsusaka, John G., Deviation From Constituent Interest: The Role of Legislative Structure and Political Parties in States.
- , Fiscal Policy, Legislature Size, and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century, *National Tax Journal*, Vol. LIN, No.1, pp. 51-82.
- Hanson, SB., Participation, Political Structure, and Concurrence, *The American Political Science Review*, Vol. 69, pp. 1181-1199.
- Handout Workshop Penyusunan Anggaran (RAPBD) Berdasarkan Pendekatan Kinerja dan Akuntansi Keuangan Pemda, Pusat Pengembangan Akuntansi

dan Bisnis Universitas Brawijaya dan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Jogjakarta.

- Hawkesworth, Mary and Kogan, Maurice, 1992, *Encyclopedia of Government and Politics*, Vol. 1, London & New York.
- Hill, John, 1991, *Financial Management in Local Government*, Studies School of Public Policy University of Birmingham.
- Howlett, Michael and Rames, M., 1995, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Oxford University Press.
- Ibrahim, M.M., 1994, Party Politics and Spending Decisions in Local Authorities, *International Journal of Public Sektor Management*, Vol. 7., No. 5, pp. 67-71.
- Imawan, Riswandha, 2002, Hak, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPRD, Makalah Bimbingan Teknis Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD, Kerjasama Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan DPRD Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur.
- _____, 2001, Fungsi Perwakilan, Pembentukan Legitimasi dan Pengambilan Keputusan, Makalah, Workshop DPRD dan Percepatan Otonomi Daerah, Krjasama DPRD Kab. Lombok Tengah dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM.
- Kim, Chong Lim, Consensus on Legislative Role Among Japanese Prefectural Assemblymen.
- Krafchick, Warren & Wehner, Joachim, 1999, The Role of Parliament in Budget Process, *Budget Information Service Institute for Democracy in South Africa*.
- Keban, Yeremias T., 1995, Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan manajemen dan Kebijakan, Fisipol, UGM, Yogyakarta.
- LaPalombara, 1997 Joseph, *Legislatures Function and Behavior*.
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- Lenin, Hov, 1997, Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Sleman DIY, *Thesis*, Yogyakarta.

- Leach, Steve & Charteris, Sue, 2000, Managing The Budgetary Process in A Hung Council, *Public Administration*, Vol. 78. No. 4. pp. 793-814
- Loewenberg, G., Legislatures and Parliaments, The Encyclopedia of Democracy.
- Makalah Bimbingan Teknis Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD, Kerjasama Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan DPRD Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur.
- Mardiasmo, Dr, MBA, Ak., 2001, Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- , 2001, Perencanaan Keuangan Publik Sebagai Suatu Tuntutan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan daerah Yang Bersih dan Berwibawa, Makalah, Jakarta.
- Maskun, Sumitro, Peran Otonomi Dalam Good Local Governance (Pengalaman Indonesia), [file:///A:/Peran Otonomi Dalam Good Local Governance.htm](file:///A:/Peran%20Otonomi%20Dalam%20Good%20Local%20Governance.htm)
- Menteri Negara Otonomi Daerah & Pusat Antar Universitas – studi Ekonomi UGM, 2000, Modul Pembekalan Teknis: manajemen Stratejik dan Tiknik Penganggaran / Keuangan Bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pemda.
- Mitchell, Jerry, 1991, Education and Skill for Public Authority Management, *Public Administration Review*, Vol. 51, No. 5, pp. 429-437.
- Murtiyati, Siti, 2001, Pengaruh Sistem Penganggaran, Sistem Pelaporan dan Analisis, Dalam Hubungan Antara Partisipasi Dengan Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, Simposium Nasional Akuntansi IV.
- Persson, Tersten et al., 2000, Comparative Politics and Public Finance, *Journal of Political Economy*, vol. 108, No. 6, pp. 1121-1161
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- , Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- , Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- , Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

- , Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Richardson, Jeremy, 2000, Government, Interest Groups, and Policy Change, *Political Studies Association*, Vol. 48, pp. 1006-1025.
- Saffell, David C., 1978, State and Local Government Politics and Public Policies, Addison – Wesley, Philippines.
- Sekaran, Uma. , 1992, Research Methods for Business : Skill Bulding Approach. New York : John Wiley & Sons Inc.
- Sastroatmodjo, Sudijono, Drs., 1995, Perilaku Politik, IKIP Semarang Press.
- Siagian, Sondang, 1998, Manajemen Stratejik, Bumi Aksara, Jakarta.
- Stiftung , Friedrich Ebert, 2001, Political Party in Legislature
- Suadi, 2000, Strategi Peningkatan Peranan Pengawasan di Daerah: Sru di Kasus Itwilprop Jambi Selaku Aparat Pengawasan Fungsional, *Thesis*, UGM, Yogyakarta.
- Soenarto, Amin, 1979, Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Komunikasi Primer, dan Keuangan Daerah Terhadap Aktivitas Para Anggota DPRD Tingkat II dalam Menjalankan Fungsi-Fungsinya, *Thesis*, UGM, Yogyakarta.
- Sujamto, 1986, Norma Pengawasan dan Etika Pengawasan Fungsional, Itjen, Depdagri, Jakarta.
- Sunarsip, 2001, Coorporat Governance Audit: Paradigma Baru Profesi Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance, *Media Akuntansi*, No. 17/Th. VII, pp. II-VII.
- Syafruddin dan Haryani, 2001, Dampak Ketidak-Pastian Lingkungan Pada Hubungan Kepemilikan dan Kinerja Organisasi, Simposium Nasional Akuntansi IV.
- Syahrudin, H., SE. MA. Prof. dan Taifur, Werry Darta, SE. MA., 2002, Peranan DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi (The Role Of The Regional Assembly In Achieving The Objective Of Decentralization and Regional Perspectives In The Implementation Of Decentralization). Faculty of Economics Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas, Regional University Research , On Decentralization in Indonesia, Project 497-0357 / 204-000, ECG,

USAID/Indonesia, Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park

Thurmaire, Kurt & Gosling, James J., 2001, The Shifting Roles of State Budget Office in Midwest: Gosling Revisited, *Public Budgeting and Finance*, Vol. 17 (4), pp. 48-70.

Wahyuningsih, Tri Harsini, 2002, Pengaruh Karakter Transaksional dan Transformasional Pimpinan Terhadap Kinerja *In-Role* dan *Organization Citizenship Behaviour* Dengan *Self-Efficacy* Sebagai Variabel Pemoderasi, Thesis, UGM, Yogyakarta

Yudoyono, Bambang, Drs., Msi, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.